

Model Integrasi Kewirausahaan Sosial dan Pedesaan Berbasis Masjid: Studi Kasus pada Masjid Nurul Ashri Sleman

Asyam Rafi Rusydi¹, Dinda Sukmaningrum²

¹ Universitas Amikom Yogyakarta

² Universitas Amikom Yogyakarta

Corresponding email: asyamrafi@students.amikom.ac.id, dinda.s@amikom.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan petani, seperti fluktuasi harga hasil panen dan ketergantungan pada tengkulak yang melemahkan posisi tawar. Di sisi lain, masjid memiliki potensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan integrasi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan oleh Masjid Nurul Ashri, mengeksplorasi perannya dalam pemberdayaan petani, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan dampaknya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi petani, pengelola Baitulmaal, dan relawan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nurul Ashri mengintegrasikan kewirausahaan sosial dan pedesaan melalui program borong panen dan jasa titip berbasis jamaah. Masjid berperan sebagai fasilitator dan mediator antara petani dan konsumen. Faktor pendukung meliputi antusiasme jamaah, keterlibatan petani, dan pemanfaatan media sosial, sedangkan hambatan mencakup keterbatasan SDM, transportasi, penyimpanan, dan fluktuasi harga. Program ini berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan petani, akses produk terjangkau, dan penguatan solidaritas sosial. Namun, penguatan sistem operasional dan keberlanjutan masih diperlukan.

Kata kunci: *kewirausahaan sosial, kewirausahaan pedesaan, pemberdayaan petani, masjid, community-based enterprise.*

Abstract

This study is motivated by challenges faced by farmers, including fluctuating crop prices and dependence on middlemen, which weaken their bargaining position. Meanwhile, mosques have significant potential to contribute not only to spiritual matters but also to community economic empowerment. This study aims to describe the integration of social entrepreneurship and rural entrepreneurship implemented by Masjid Nurul Ashri, explore its role in empowering farmers, and identify supporting and inhibiting factors as well as its impacts. This research employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include farmers, Baitulmaal managers, and volunteers. Data were analyzed descriptively.

The results show that Masjid Nurul Ashri integrates social and rural entrepreneurship through crop purchasing and community-based personal shopping (jastip) programs. The mosque acts as a facilitator and mediator connecting farmers and consumers. Supporting factors include community enthusiasm, farmer participation, and social media utilization, while challenges include limited human resources, transportation, storage, and price fluctuations. The program positively impacts farmers' welfare, provides affordable fresh products to the community, and strengthens social solidarity. However, improvements in operational systems and sustainability are still needed.

Keywords: *social entrepreneurship, rural entrepreneurship, farmer empowerment, mosque, community-based enterprise.*

I. PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Keterbatasan modal usaha, infrastruktur jalan yang belum layak, serta akses listrik dan internet yang belum merata menjadi hambatan utama produktivitas sektor pertanian dan usaha mikro di pedesaan. Penelitian (Hadi, 2018) menunjukkan bahwa pada 2016 hanya sekitar 26,3% rumah tangga pedesaan yang memiliki akses internet. Akses internet yang rendah berdampak langsung terhadap pendapatan petani, sebagaimana ditunjukkan oleh (Sugiharti et al., 2024) yang menemukan bahwa

rumah tangga petani dengan akses internet memiliki peningkatan pendapatan secara signifikan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur fisik juga menjadi kendala. Pada penelitian oleh (Wahyuni et al., 2022) menunjukkan bahwa tingkat akses jalan aspal di pedesaan Indonesia masih rendah, sehingga menghasilkan biaya distribusi hasil pertanian yang cukup tinggi dan ketimpangan antar wilayah signifikan.

Keterbatasan akses terhadap subsidi pupuk dan bahan bakar (solar) bagi alat pertanian turut meningkatkan biaya produksi, sementara harga jual hasil panen sering anjlok ketika terjadi surplus pasokan (Lestari et al., 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa petani tidak hanya menghadapi kendala dalam proses produksi, tetapi juga dalam aspek distribusi dan stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap pendapatan mereka.

Fenomena alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan hunian atau industri turut mempersempit ruang produksi pertanian. Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Indonesia berlangsung cukup masif dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (2019) yang dimuat pada (Kompas.id, 2023), Indonesia kehilangan sekitar 100.000 hingga 150.000 hektare lahan sawah setiap tahun akibat konversi lahan untuk perumahan dan industri. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya kapasitas produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, urbanisasi tenaga kerja muda ke kota mengurangi regenerasi petani di desa, mobilitas petani muda memperlihatkan tantangan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia

Misalnya, di DIY tercatat sekitar 153 ribu petani meninggalkan sektor pertanian dalam dekade terakhir (Fahriza & Irkhani, 2025). Berdasarkan data BPS di Provinsi Jawa Tengah, luas panen padi tahun 2024 di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,55 juta ha, dan produksinya mencapai 8,89 juta ton gabah kering giling (GKG) (setara \pm 5,11 juta ton beras) menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar kedua secara nasional (BPS JAWA TENGAH, 2025). Meskipun sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi di wilayah pedesaan dan menyerap banyak tenaga kerja, kesejahteraan petani masih relatif rendah. Nilai tambah dari aktivitas pertanian juga belum optimal karena mayoritas petani masih menjual hasil dalam bentuk mentah dan bergantung pada fluktuasi harga pasar. Menurut data (Kementerian Pertanian, 2024) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional masih signifikan, namun produktivitas dan pendapatan petani tidak tumbuh seimbang dengan sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi tenaga kerja pedesaan dan hasil ekonomi yang dihasilkan.

Masalah lain yang sering dihadapi di wilayah pedesaan adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian primer dengan nilai tambah yang rendah dari hasil panen. Banyak petani mengalami kesulitan memperoleh harga jual yang layak ketika terjadi kelebihan pasokan atau gangguan rantai pasok. Selain itu, kondisi ekonomi-sosial yang lebih menarik di kota mendorong urbanisasi tenaga kerja muda dari desa ke perkotaan suatu dinamika yang memperkuat ketimpangan antar wilayah (Ibanez, 2024). Padahal, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan karakter sosial yang kuat, desa memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pendekatan kewirausahaan yang inovatif dan berbasis komunitas.

Kewirausahaan sosial berfokus pada penciptaan nilai sosial dengan model bisnis berkelanjutan, sedangkan kewirausahaan pedesaan menekankan pemanfaatan potensi lokal dan partisipasi komunitas. Keduanya dapat diintegrasikan melalui model bisnis sosial yang berbasis pada sumber daya pedesaan. Integrasi kedua pendekatan ini diyakini dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa, terutama jika melibatkan aktor-aktor sosial lokal seperti lembaga keagamaan. Namun demikian, dalam praktiknya kedua pendekatan tersebut seringkali berjalan secara terpisah. Kewirausahaan sosial lebih banyak berkembang di wilayah perkotaan dengan pendekatan filantropi modern, sementara kewirausahaan pedesaan cenderung berfokus pada aktivitas ekonomi berbasis lokal tanpa integrasi nilai sosial yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan suatu model integratif yang mampu menghubungkan penciptaan nilai sosial dengan aktivitas ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, pemilihan lembaga keagamaan sebagai aktor dalam integrasi kewirausahaan sosial dan pedesaan bukan tanpa alasan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki jaringan masjid yang tersebar luas hingga ke tingkat komunitas terkecil. Selain itu, masjid umumnya memiliki potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang signifikan, salah satunya berasal dari dana infaq, sedekah, dan partisipasi jamaah yang terkumpul secara rutin. Namun demikian, dalam banyak kasus, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara produktif untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi

yang berkelanjutan, dan masih cenderung difokuskan pada kegiatan konsumtif atau operasional keagamaan semata. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk mengoptimalkan peran masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung kesejahteraan petani di wilayah pedesaan.

Lebih lanjut, peran masjid dalam konteks pemberdayaan ekonomi telah mulai berkembang untuk menjadi motor penggerak ekonomi umat. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga dapat berperan sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi (Saputra & Agustina, 2021). Sejumlah masjid telah menginisiasi program produktif seperti koperasi syariah, pemberdayaan UMKM jamaah, hingga kemitraan dengan petani. Penelitian oleh (Faizal et al., 2023) menunjukkan bahwa masjid yang dikelola secara profesional mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar melalui kolaborasi berbasis nilai-nilai keislaman.

Salah satu contoh nyata penerapan konsep tersebut dapat ditemukan di Masjid Nurul Ashri, yang terletak di Deresan, Kalurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini dikenal sebagai "*masjid sahabat petani*" karena sejumlah inisiatif konkret yang mengintegrasikan nilai sosial-keagamaan dengan kewirausahaan pedesaan. Masjid Nurul Ashri selain digunakan untuk sholat lima waktu, juga memiliki banyak program pemberdayaan masyarakat. Program unggulannya adalah mensejahterahkan petani melalui gerakan jasa titip (*jastip*) sayur serta pembelian langsung hasil panen dari petani.

Melalui kegiatan-kegiatan ini, Masjid Nurul Ashri secara nyata menjalankan integrasi antara kewirausahaan sosial (dengan menekankan nilai keadilan, partisipasi jamaah, dan kesejahteraan petani) dan kewirausahaan pedesaan (memanfaatkan potensi hasil tani lokal serta memperbaiki akses pasar).

Praktik Masjid Nurul Ashri menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan dapat menjadi aktor ekonomi sosial yang mempertemukan nilai agama, sosial, dan ekonomi dalam satu model pemberdayaan. Inovasi seperti ini memiliki relevansi luas bagi pengembangan ekonomi pedesaan di wilayah DIY dan Jawa Tengah, yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian organik, agrowisata, dan ekonomi lokal berbasis komunitas (Irwantoro, 2023).

Namun, meskipun praktik seperti di atas telah berjalan cukup baik, kajian akademik yang secara spesifik meneliti bagaimana integrasi antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan berbasis masjid masih terbatas. Belum banyak penelitian yang membahas bagaimana kolaborasi tersebut dikelola, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampak sosial-ekonominya terhadap petani maupun jamaah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengambil studi kasus Masjid Nurul Ashri Deresan Sleman dengan jaringan petaninya di DIY dan Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep model integrasi kewirausahaan sosial dan pedesaan, sekaligus menjadi model praktis yang dapat direplikasi pada konteks serupa bagi pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga keagamaan di wilayah pedesaan.

II. METODE / METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik integrasi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan yang dilakukan oleh Masjid Nurul Ashri. Penelitian bersifat deskriptif, berfokus pada proses, mekanisme, serta dinamika kolaborasi antara masjid dan petani.

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ketua program masjid, relawan/pengelola Baitulmaal, serta petani mitra dari Magelang, Purworejo, dan Gunungkidul. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi kegiatan, laporan program, dan arsip terkait. Penelitian dilaksanakan di Masjid Nurul Ashri Deresan Sleman dan wilayah mitra petani, pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi sumber dan metode serta member check.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta pengelompokan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar

fenomena. Pendekatan ini memungkinkan interpretasi mendalam terhadap peran masjid, mekanisme kolaborasi, serta dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION

Program sebagai Praktik Kewirausahaan Berbasis Inovasi Sosial

Hasil dan pembahasan Program borong hasil panen dan skema jasa titip (jastip) yang dijalankan oleh Masjid Nurul Ashri merupakan bentuk nyata praktik kewirausahaan berbasis inovasi sosial yang lahir dari respons terhadap permasalahan ekonomi petani di tingkat pedesaan. Program ini berawal dari fenomena harga komoditas pertanian seperti sayuran, singkong, dan semangka yang mengalami penurunan drastis hingga mencapai titik terendah, sehingga menyebabkan kerugian signifikan bagi petani.

Menanggapi kondisi tersebut, pihak Masjid Nurul Ashri melakukan observasi dan survei langsung ke lapangan untuk memvalidasi informasi mengenai anjloknya harga komoditas pertanian. Hasil temuan menunjukkan bahwa kondisi tersebut benar-benar terjadi dan berdampak pada ketidakmampuan petani menutup biaya produksi. Salah satu petani menyatakan bahwa harga pakcoy pernah berada pada kisaran Rp 500/kg sebelum kemudian diborong oleh masjid dengan harga yang lebih layak, yaitu sekitar Rp 2.000/kg. Hal ini menunjukkan adanya intervensi langsung dari lembaga keagamaan dalam merespons kegagalan pasar di tingkat petani.

Sebagai bentuk respons awal, Masjid Nurul Ashri kemudian melakukan pembelian hasil panen petani dengan harga yang lebih stabil atau harga normal sebagai upaya untuk membantu petani mengurangi kerugian. Hasil panen tersebut tidak diperjualbelikan kembali untuk keuntungan, melainkan disalurkan kepada jamaah melalui kegiatan sosial seperti pembagian setelah kajian Subuh hari Jumat.

Salah satu petani sayur di Magelang menyampaikan “Kaya waktu awal pak coy 500 perak itu, diambil Nurul Ashri 2 ribu. Ya yang keambil senengnya bukan main” (Pak Pri, Petani Sayur Magelang).

Selain itu, petani juga merasakan perubahan signifikan dalam keberlanjutan pemasaran hasil panen. “Nah setelah kenal Nurul Ashri ini Alhamdulillah setiap pekan hari Rabu pesanan masuk, nanti Kamis diantar atau kadang diambil juga ke sini. Kadang 9 kuintal, 1 ton, 1 ton setengah, 2 ton juga pernah” (Pak Pri, Petani Sayur Magelang).

Seiring berjalannya waktu, program ini tidak hanya berhenti pada mekanisme pembelian dan distribusi sosial, tetapi berkembang menjadi sistem partisipatif berbasis komunitas melalui skema jasa titip (jastip). Munculnya jastip berangkat dari meningkatnya antusiasme jamaah yang tidak hanya ingin menerima hasil panen secara gratis, tetapi juga ingin berpartisipasi dalam membantu petani melalui pembelian langsung.

Program jastip kemudian difasilitasi melalui media sosial masjid seperti grup WhatsApp jamaah, Instagram, serta konten naratif digital yang menggambarkan kondisi petani. Jamaah dapat melakukan pemesanan melalui tautan yang disediakan, melakukan pembayaran sesuai pesanan, serta memilih apakah hasil jastip akan diambil sendiri atau disedekahkan kembali melalui masjid. Sebagaimana dijelaskan oleh pengelola program “Agar jamaah mau ikut jastip itu pasti ada narasi yang kita bangun di media sosial” (Mas Ilham, Staff Baitulmaal).

Proses berjalannya program juga berkembang secara adaptif. Awalnya informasi disebarkan melalui grup kajian, kemudian karena meningkatnya jumlah partisipan, dibentuk grup khusus jastip sayur. Hal ini menunjukkan adanya dinamika komunitas digital yang mendukung keberlanjutan program. “Awalnya dari grup kajian gitu, disebarin info kalau ada jastip sayur, lama-lama dibuat grup jastip sayur” (Mba Hilda, Relawan Masjid).

Secara operasional, panen dilakukan oleh relawan, tim masjid, serta petani, kemudian hasilnya dibawa ke masjid pada malam hari. Distribusi dilakukan pada Jumat pagi setelah kajian Subuh dalam bentuk bazar sayur gratis, sekaligus pengambilan jastip bagi jamaah yang telah berpartisipasi. Sementara itu, bagi jamaah yang memilih opsi sedekah, hasil jastip akan didistribusikan kembali kepada pondok pesantren, panti asuhan, maupun masyarakat yang membutuhkan.

Selain pada komoditas sayur, program ini juga diterapkan pada komoditas lain seperti singkong di Gunungkidul dan semangka di Purworejo. Salah satu petani singkong menyampaikan:

“Borong singkong kemarin di sini 2x ambil, yang pertama 6 ton lebih, yang kedua juga harusnya sampai 6 ton” (Bu Dukuh Petir, Petani Singkong Gunungkidul).

Jika dianalisis, program ini menunjukkan adanya praktik kewirausahaan sosial berbasis inovasi sosial karena mampu menghadirkan solusi atas kegagalan pasar yang dialami petani. Inovasi tersebut tidak hanya terletak pada aspek pembelian hasil panen, tetapi juga pada pembentukan sistem distribusi berbasis komunitas yang melibatkan jamaah sebagai aktor ekonomi sekaligus sosial.

Hal ini sejalan dengan konsep *social entrepreneur as an agent of change* yang dikemukakan oleh Dees (1998), di mana pelaku kewirausahaan sosial berperan dalam menciptakan solusi atas permasalahan sosial secara inovatif. Dalam konteks ini, Masjid Nurul Ashri berperan sebagai agen perubahan yang mengintervensi ketimpangan harga pasar pertanian.

Selain itu, temuan ini juga sesuai dengan konsep Mair & Martí (2004) yang menekankan penciptaan nilai sosial (*social value creation*), di mana program tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi bagi petani, tetapi juga nilai sosial berupa solidaritas jamaah dan keterlibatan komunitas dalam aktivitas ekonomi produktif.

Lebih jauh, model ini juga mencerminkan konsep *social business* dari Yunus (2010), karena keuntungan yang dihasilkan tidak menjadi tujuan utama, melainkan diarahkan untuk keberlanjutan program dan kesejahteraan sosial petani. Di sisi lain, keterlibatan jamaah sebagai pasar kolektif menunjukkan karakteristik *community-based enterprise* sebagaimana dijelaskan oleh Peredo & Chrisman (1991), yaitu keterlibatan komunitas dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian Solihah et al. (2022) lebih berfokus pada pemberdayaan UMKM lokal tanpa adanya peran aktif lembaga keagamaan sebagai penggerak pasar alternatif. Sementara itu, penelitian Fahrurrozi & Fauzi (2024) menunjukkan peran lembaga zakat dalam membantu petani, namun masih bersifat bantuan satu arah dan belum membentuk sistem pasar komunitas yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai *market creator* yang menggerakkan jamaah untuk membentuk pasar alternatif berbasis komunitas. Hal ini menghasilkan hubungan yang lebih seimbang antara petani dan konsumen, di mana petani memperoleh harga yang lebih stabil dan layak, sedangkan jamaah memperoleh akses terhadap produk pertanian dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pasar konvensional.

Dengan demikian, program borong panen dan jastip di Masjid Nurul Ashri dapat dipahami sebagai bentuk inovasi sosial dalam kewirausahaan yang mengintegrasikan peran masjid, petani, dan jamaah dalam satu sistem ekonomi berbasis komunitas. Program ini tidak hanya merespons masalah ekonomi petani, tetapi juga menciptakan model distribusi baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Implementasi Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Petani

Program Implementasi kewirausahaan sosial dalam program Masjid Nurul Ashri terlihat secara nyata melalui upaya pemberdayaan petani yang sebelumnya berada dalam posisi lemah dalam rantai distribusi hasil pertanian. Sebelum adanya program ini, petani sangat bergantung pada tengkulak sebagai satu-satunya saluran penjualan hasil panen. Dalam kondisi tersebut, tengkulak memiliki posisi dominan dalam menentukan harga tanpa adanya transparansi, sehingga petani tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga jual hasil panen mereka sendiri. Akibatnya, petani sering kali harus menerima harga yang sangat rendah meskipun biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi. Salah satu contoh yang terjadi adalah pada komoditas pakcoy dan singkong yang hanya dihargai sekitar Rp500/kg, sehingga tidak mampu menutup modal produksi.

Kondisi tersebut berubah setelah hadirnya program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Melalui program ini, petani tidak lagi hanya bergantung pada tengkulak, tetapi memiliki akses alternatif penjualan melalui Masjid Nurul Ashri. Masjid berperan sebagai lembaga perantara yang membeli hasil panen dengan harga yang lebih layak dan menguntungkan bagi petani. Sebagai contoh, ketika harga pakcoy dan singkong di tengkulak hanya berada pada kisaran Rp500/kg, masjid melakukan pembelian dengan harga sekitar

Rp2.000/kg. Hal ini memberikan kepastian pendapatan bagi petani serta membantu mereka menutup biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang lebih adil.

Salah satu petani singkong menyampaikan kondisi tersebut:

“Gaplek kering diharga 2800/kg, kalau singkong mentah sebelum diborong Nurul Ashri 500/kg. Sama masjid dibeli 2000/kg” (Bu Dukuh, Petani Singkong Gunungkidul).

Selain berperan sebagai pembeli hasil panen, Masjid Nurul Ashri juga mengembangkan mekanisme distribusi berbasis komunitas melalui skema jasa titip (jastip). Dalam sistem ini, hasil panen yang telah dibeli oleh masjid ditawarkan kepada jamaah dengan harga yang masih kompetitif di pasar, misalnya singkong dijual melalui jastip dengan harga sekitar Rp3.000/kg. Selisih harga tersebut tidak dijadikan sebagai keuntungan utama, melainkan digunakan untuk mendukung biaya operasional program seperti transportasi, bahan bakar, dan kebutuhan distribusi lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh ketua program:

“Misal dari petani itu harganya jatuh di 500 misalkan. Kita beli di harga 2000, kita umumkan. Kita beli 2000 di petani, kita tawarkan ke customer atau jastiper tadi diakad 3000. Nah gap 1000-nya untuk apa, yaitu untuk penanganan operasional seperti bensin, packing, dan kadang juga untuk tenaga di lapangan” (Pak Nyoto, Ketua Program).

Melalui mekanisme ini, Masjid Nurul Ashri tidak hanya berfungsi sebagai pembeli hasil panen, tetapi juga sebagai fasilitator distribusi yang menghubungkan petani dengan jamaah sebagai konsumen. Jamaah memiliki fleksibilitas untuk memilih apakah hasil jastip digunakan untuk konsumsi pribadi, dijual kembali, atau disedekahkan melalui masjid. Bagi jamaah yang memilih opsi sedekah, hasil jastip akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti pondok pesantren, panti asuhan, maupun masyarakat umum melalui kegiatan bazar sayur gratis setiap Jumat pagi setelah kajian Subuh.

Dari sisi petani, implementasi program ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Petani tidak hanya memperoleh harga yang lebih stabil, tetapi juga mendapatkan kepastian pembelian secara berkelanjutan. Salah satu petani semangka menyampaikan:

“Masa-masa kemarin (2024–2025) ya membantu banget. Kemarin kita dapat duit 2 juta, 3 juta, ada yang 7 juta 6 juta. Alhamdulillah modal ketutup dan ada upah” (Pak Ari, Petani Semangka Purworejo).

Selain itu, pada komoditas tertentu seperti sayur di Magelang, pengambilan hasil panen dilakukan secara rutin setiap minggu, bahkan dalam jumlah besar yang mencapai 1 hingga 2 ton. Hal ini menunjukkan adanya stabilitas pasar yang sebelumnya tidak dimiliki petani ketika hanya bergantung pada tengkulak.

Jika dianalisis, implementasi program ini mencerminkan praktik kewirausahaan sosial yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *community-based enterprise* yang dikemukakan oleh Peredo & Chrisman (1991), di mana komunitas berperan aktif dalam mengelola kegiatan ekonomi untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Masjid Nurul Ashri menjadi penggerak utama yang menghubungkan petani, jamaah, dan sistem distribusi berbasis komunitas.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan Mair & Marti (2004) yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial berfokus pada penciptaan nilai sosial (*social value creation*), yaitu peningkatan kesejahteraan petani sekaligus penguatan solidaritas sosial antarjamaah. Model ini juga mencerminkan konsep Yunus (2010) tentang *social business*, di mana aktivitas ekonomi tidak berorientasi pada profit maksimal, melainkan pada kebermanfaatan sosial yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, implementasi ini memiliki karakteristik yang lebih terintegrasi. Penelitian Anom & Hendayana (2025) menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan potensi lokal, namun belum menyoroti peran lembaga keagamaan sebagai aktor utama penggerak ekonomi komunitas. Sementara itu, penelitian Aqna et al. (2025) menekankan bahwa program berbasis masjid dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan komunitas, namun belum secara spesifik mengaitkan dengan pemberdayaan ekonomi petani.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai lembaga sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang menciptakan sistem pasar alternatif berbasis komunitas. Hal ini menjadikan program lebih komprehensif karena tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat partisipasi jamaah dalam sistem ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi kewirausahaan sosial dalam program Masjid Nurul Ashri menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam struktur pemberdayaan petani, dari sistem ketergantungan terhadap tengkulak menuju sistem kolaboratif berbasis komunitas. Program ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi berupa peningkatan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan nilai sosial berupa solidaritas, partisipasi jamaah, dan keberlanjutan sistem ekonomi berbasis masjid.

Model Ekosistem Ekonomi Berbasis Masjid

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan tidak hanya bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi suatu ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Ekosistem ini menghubungkan petani sebagai produsen dengan jamaah sebagai konsumen dan partisipan melalui masjid sebagai penghubung utama. Dengan demikian, masjid tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berperan sebagai pusat penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Dalam ekosistem ini, terdapat beberapa aktor utama yang saling terhubung dan memiliki peran masing-masing. Petani berperan sebagai produsen yang menyediakan hasil panen, masjid berfungsi sebagai pengelola sistem sekaligus penghubung antara petani dan jamaah, sementara jamaah berperan sebagai konsumen, donatur, sekaligus partisipan yang dapat membeli, menyedekahkan, maupun menerima manfaat dari program bazar. Relawan masjid bertindak sebagai operator lapangan yang menghubungkan langsung petani dan jamaah dalam proses distribusi. Selain itu, media sosial menjadi elemen penting dalam menggerakkan sistem melalui penyebaran informasi dan pembangunan narasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan: “Dipublikasi di sosmed sama di broadcast kita. Mayoritas itu bukan jamaah masjid tapi jamaah luar. Kan kita nyebutnya juga jamaah, jamaah online.” (Pak Nyoto, Ketua Program).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ekosistem yang terbentuk tidak hanya terbatas pada jamaah fisik, tetapi juga meluas ke komunitas digital, sehingga memperkuat daya jangkau pasar.

Ekosistem ini terbentuk sebagai respons terhadap fenomena berulang di sektor pertanian, yaitu anjloknya harga komoditas akibat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kondisi ini dijelaskan oleh informan sebagai berikut: “Ketika panennya melimpah, grafiknya jadi naik jadi seolah-olah rendah, demand itu sebenarnya stuck, yang naik turun itu supply-nya.” (Pak Nyoto, Ketua Program). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada kelebihan pasokan yang tidak diimbangi oleh peningkatan permintaan. Dalam konteks ini, masjid hadir sebagai intervensi pasar dengan memborong hasil panen pada harga yang lebih layak, sekaligus membantu mengurangi kelebihan stok di lapangan.

Hasil panen yang telah diborong kemudian didistribusikan melalui mekanisme jasa titip (jastip) kepada jamaah. Jamaah diberikan pilihan untuk mengambil hasil panen atau menyedekahkannya kembali melalui masjid. Selanjutnya, hasil panen tersebut disalurkan melalui bazar gratis setelah kajian subuh maupun didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses ini membentuk suatu siklus berulang, yaitu panen kemudian distribusi baik konsumsi/sedekah dan memberikan dampak kembali ke petani, sehingga menciptakan siklus ekonomi komunitas yang berkelanjutan.

Keberlanjutan sistem ini juga terlihat dari konsistensi pelaksanaan program yang terus berjalan dari waktu ke waktu. Hal ini ditegaskan oleh informan:

“Kalau program borong yang gagal itu nggak ada ya, karena semua tetap berlanjut berulang. Kaya sayur dari 2024 sampai 2026 masih jalan, semangka juga masih jalan, singkong bahkan bisa sampai beberapa kali pengambilan.” (Mas Ilham, Staff Baitulmaal).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa program tidak bersifat sementara, melainkan telah menjadi pola yang terus berulang dan berkembang. Bahkan, dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan:

“Dulu susu kita juga nggak nyangka akan berhasil, nggak sampai 24 jam sudah terkumpul 1200 liter. Singkong awalnya kita skeptis tapi ternyata banyak yang ikut kontribusi, bahkan lembaga-lembaga juga menitipkan ke masjid.” (Mas Ilham, Staff Baitulmaal). Hal ini memperlihatkan bahwa ekosistem yang terbentuk tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga mulai menarik partisipasi lembaga lain, sehingga memperkuat skala dan dampaknya.

Model ekosistem ini memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, berbasis komunitas, di mana jamaah berfungsi sebagai pasar kolektif. Kedua, bersifat hybrid karena menggabungkan nilai sosial dan

aktivitas ekonomi dalam satu sistem. Ketiga, tidak berorientasi pada profit, melainkan pada kebermanfaatan sosial, meskipun tetap mampu berjalan secara berkelanjutan. Keempat, fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Kelima, mengintegrasikan sistem offline melalui bazar langsung dengan sistem online melalui media sosial.

Dalam keseluruhan sistem ini, masjid berperan sebagai pusat (core system) yang menggerakkan, menghubungkan, dan mengatur alur dari produksi hingga konsumsi. Tanpa peran masjid, ekosistem ini tidak dapat berjalan secara optimal. Keberlanjutan sistem juga didukung oleh tingginya partisipasi jamaah, ketersediaan pasokan dari petani, serta nilai sosial yang melekat, seperti praktik sedekah dari jamaah maupun petani.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan. Penelitian oleh Fahrurrozi & Fauzi (2024) menunjukkan kolaborasi antara lembaga sosial dan petani, namun belum membentuk sistem yang berkelanjutan dan belum menciptakan pasar baru. Sementara itu, penelitian Suhartini & Hasrudin (2025) menunjukkan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi belum mengintegrasikan hubungan langsung antara masjid dan petani dalam suatu sistem ekonomi yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model ekosistem ekonomi berbasis masjid yang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu sistem komunitas.

Secara teoritis, temuan ini selaras dengan konsep community-based enterprise dari Peredo & Chrisman, di mana komunitas menjadi aktor utama dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, konsep social value dari Mair & Martí tercermin dalam adanya nilai kesejahteraan dan solidaritas yang dihasilkan. Model ini juga sejalan dengan konsep bisnis sosial dari Yunus, yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan pada penciptaan manfaat sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa Masjid Nurul Ashri telah berhasil membangun suatu model ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam satu sistem yang berkelanjutan. Model ini tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan petani, tetapi juga menunjukkan potensi besar lembaga keagamaan dalam menciptakan sistem ekonomi alternatif yang inklusif dan berkeadilan.

Dampak Sosial Program terhadap Petani dan Komunitas

Program pemberdayaan ekonomi melalui skema borong hasil panen dan jasa titip (jastip) yang dijalankan oleh Masjid Nurul Ashri tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial yang signifikan bagi petani dan komunitas jamaah. Dampak sosial ini tercermin dalam transformasi posisi petani, perubahan relasi sosial, terbentuknya solidaritas komunitas, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas berbasis masjid.

Sebelum adanya program, petani berada dalam kondisi yang rentan karena ketergantungan pada tengkulak yang menentukan harga secara sepihak tanpa transparansi. Dalam kondisi tertentu, harga hasil panen berada pada titik yang sangat rendah sehingga tidak mampu menutup biaya produksi. Hal ini menyebabkan petani tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga kehilangan motivasi untuk melanjutkan aktivitas pertanian. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ari, petani semangka, “Kemarin 2025 banyak petani modalnya saja nggak ketutup kalo yang nggak ke Nurul Ashri. Karena dihargai 500, 1 juta, ada yang bahkan cuma 300, paling besar 1,5 juta per lahan.” Namun, setelah adanya program dari masjid, kondisi tersebut mengalami perubahan. Petani mulai memperoleh harga yang lebih layak dan mampu menutup biaya produksi serta mendapatkan keuntungan. “Kemarin kita dapat duit 2 juta, 3 juta, ada yang 7 juta 6 juta. Alhamdulillah modal ketutup dan ada upah.” Selain dampak ekonomi, program ini juga berkontribusi terhadap pemulihan kepercayaan diri petani. Petani yang sebelumnya merasa dirugikan oleh sistem pasar kini kembali memiliki semangat untuk menanam karena adanya kepastian pasar yang lebih adil.

Program ini juga mengubah pola relasi sosial dalam sistem distribusi hasil pertanian. Sebelumnya, hubungan antara petani dan tengkulak bersifat tidak seimbang, di mana petani berada pada posisi yang lemah tanpa kemampuan menentukan harga. Petani hanya dapat menerima harga yang ditentukan secara sepihak, meskipun hal tersebut merugikan. Melalui intervensi masjid, relasi tersebut mengalami transformasi menjadi lebih setara dan kolaboratif. Petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak, melainkan memiliki alternatif pasar yang memberikan harga yang saling menguntungkan bagi petani maupun jamaah. Dalam

konteks ini, masjid berperan sebagai penghubung yang menciptakan keseimbangan baru dalam sistem distribusi, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dan tidak lagi berada dalam tekanan pasar yang eksploitatif.

Dampak sosial yang menonjol dari program ini adalah terbentuknya solidaritas sosial di antara jamaah dan petani. Tingginya partisipasi jamaah dalam program jastip menunjukkan adanya keterlibatan yang tidak hanya didorong oleh kebutuhan konsumsi, tetapi juga oleh kepedulian terhadap kondisi petani. Antusiasme jamaah terlihat dari volume partisipasi yang besar, seperti pada komoditas singkong yang mencapai lebih dari 6 ton dalam satu kali panen dan dilakukan berulang kali, serta komoditas sayur yang diambil secara rutin setiap pekan. Sebagaimana disampaikan oleh Mba Risqa pengelola Baitulmaal, "Dulu sayur awal-awal 7 ton, trus 5 ton, sekarang tapi stabil di seton-seton." Hal ini menunjukkan bahwa jamaah tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan sosial yang mendukung kesejahteraan petani. Fenomena ini sejalan dengan konsep social value dari Mair dan Martí (2004), di mana kewirausahaan sosial tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial melalui keterlibatan komunitas.

Selain itu, program ini juga berdampak pada meningkatnya partisipasi komunitas serta terbentuknya jaringan sosial baru. Jamaah yang terlibat tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar masjid, tetapi juga dari luar daerah yang terhubung melalui media sosial. Di sisi lain, petani mulai memahami kondisi pasar dari sudut pandang konsumen, sementara jamaah menjadi lebih memahami kesulitan yang dihadapi petani. Interaksi ini menciptakan hubungan timbal balik yang sebelumnya tidak terbentuk dalam sistem distribusi konvensional. Petani tidak lagi hanya berperan sebagai produsen pasif, tetapi menjadi bagian dari jaringan sosial yang lebih luas, sementara jamaah tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi petani.

Program ini juga menghasilkan dampak sosial tidak langsung, seperti meningkatnya kepercayaan petani terhadap lembaga masjid, perubahan pola konsumsi jamaah, serta munculnya kesadaran kolektif untuk mendukung produk lokal. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program, karena petani merasa memiliki mitra yang dapat diandalkan dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Di sisi lain, jamaah juga mengalami perubahan perspektif dalam konsumsi, di mana pembelian tidak hanya didasarkan pada harga, tetapi juga pada nilai sosial yang terkandung di dalamnya.

Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan konsep bisnis sosial yang dikemukakan oleh Muhammad Yunus (2010), di mana kegiatan ekonomi tidak berorientasi pada profit semata, tetapi pada manfaat sosial yang lebih luas. Dalam praktiknya, masjid tidak mengambil keuntungan besar, melainkan hanya mengambil selisih untuk menutup biaya operasional, sehingga tujuan utama tetap pada pemberdayaan petani dan pelayanan kepada jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial yang menjadi dasar utama.

Secara keseluruhan, program borong hasil panen dan jastip yang dijalankan oleh Masjid Nurul Ashri telah menghasilkan transformasi sosial yang signifikan. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mengubah relasi sosial dalam sistem distribusi, membangun solidaritas komunitas, serta memperluas jaringan sosial antara petani dan masyarakat. Dengan demikian, program ini menunjukkan bahwa masjid dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengintegrasikan aktivitas keagamaan dengan pemberdayaan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, sehingga menciptakan dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural.

Peran Masjid sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Masjid Nurul Ashri menunjukkan karakter keberlanjutan yang kuat. Program ini telah berjalan secara rutin sejak tahun 2023 hingga 2026, dengan pola yang berulang pada berbagai komoditas. Pada komoditas sayur, program dilaksanakan setiap minggu (khususnya hari Kamis untuk panen dan Jumat untuk distribusi), sementara pada komoditas lain seperti semangka dilakukan mengikuti musim panen, dan singkong dilaksanakan beberapa kali dalam satu musim. Selain itu, program juga merespons kasus-kasus insidental seperti pada komoditas susu sapi, salak, dan melon. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak bersifat satu kali kegiatan, melainkan terus berjalan mengikuti dinamika permasalahan yang dihadapi petani di lapangan. Dengan demikian,

program ini tidak hanya berkelanjutan secara operasional, tetapi juga bersifat adaptif karena tidak terpaku pada satu jenis komoditas tertentu.

Keberlanjutan program ini juga terlihat dari terbentuknya suatu pola siklus yang berulang. Proses dimulai dari kegiatan panen oleh petani, kemudian hasil panen diborong oleh masjid dengan harga yang layak, selanjutnya didistribusikan kepada jamaah melalui mekanisme jasa titip (jastip), bazar, maupun sedekah. Dampak dari distribusi tersebut kembali dirasakan oleh petani dalam bentuk peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi, yang kemudian mendorong keberlanjutan produksi pada periode panen berikutnya. Siklus ini terus berulang dan membentuk suatu sistem yang tidak bersifat linear, melainkan sirkular, di mana setiap aktor saling terhubung dan berkontribusi terhadap keberlangsungan program.

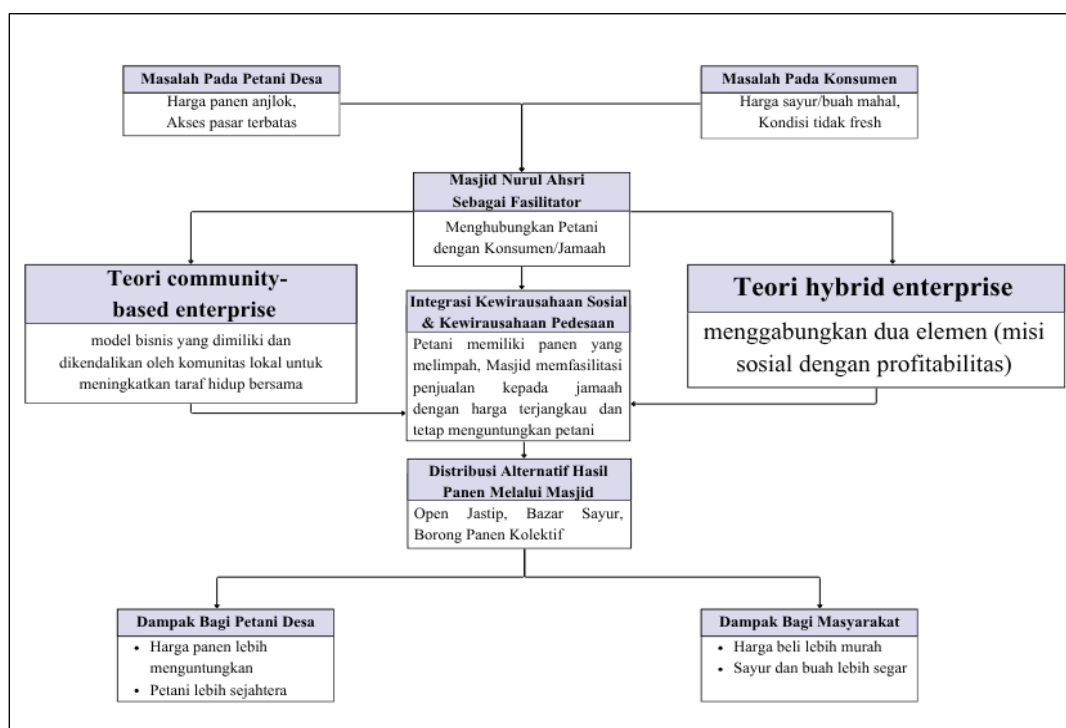
Meskipun demikian, keberlanjutan program tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kendala logistik dan distribusi, keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil panen, serta fluktuasi harga komoditas menjadi faktor yang berpotensi menghambat jalannya program. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya menjadi hambatan operasional, tetapi juga berpotensi menjadi risiko terhadap keberlanjutan program dalam jangka panjang apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang adaptif dan koordinasi yang efektif agar program tetap dapat berjalan secara konsisten.

Di sisi lain, keberlanjutan program ini tidak didorong oleh orientasi keuntungan finansial semata, melainkan oleh nilai sosial dan keterlibatan komunitas yang kuat. Tingginya partisipasi jamaah sebagai konsumen, donatur, sekaligus penerima manfaat menjadi faktor utama yang menjaga keberlangsungan program. Hal ini sejalan dengan konsep social business yang dikemukakan oleh Yunus (2010), di mana suatu usaha dapat tetap berkelanjutan meskipun tidak berorientasi pada profit maksimal, melainkan pada penciptaan manfaat sosial. Selain itu, program ini juga mencerminkan konsep community-based enterprise sebagaimana dijelaskan oleh Peredo & Chrisman (1991), di mana komunitas berperan sebagai aktor utama dalam mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, keterlibatan jamaah yang didorong oleh nilai empati dan solidaritas sosial menunjukkan adanya penciptaan social value sebagaimana dikemukakan oleh Mair & Marti (2004), yang menjadi faktor penting dalam menjaga partisipasi dan keberlangsungan program.

Dengan demikian, keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid ini tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan operasional, tetapi juga oleh kekuatan nilai sosial dan partisipasi komunitas yang terbangun di dalamnya. Program ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan komunitas dapat menghasilkan suatu model pemberdayaan yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menunjukkan bahwa program Baitulmaal Masjid Nurul Ashri merupakan implementasi nyata dari integrasi antara kewirausahaan, kewirausahaan sosial, dan kewirausahaan pedesaan dalam satu model yang utuh. Program ini tidak hanya berfokus pada aktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan nilai sosial melalui peningkatan kesejahteraan petani, penguatan ekonomi komunitas jamaah, serta perluasan akses pasar bagi petani yang sebelumnya bergantung pada tengkulak. Dalam hal ini, masjid berperan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai mediator sosial dan penggerak komunitas yang mampu menghubungkan petani dengan jamaah sebagai pasar kolektif.

Lebih lanjut, sistem jasa titip (jastip) yang dikembangkan oleh Masjid Nurul Ashri menjadi bentuk inovasi pasar alternatif yang memungkinkan petani menjual hasil panennya secara langsung kepada konsumen tanpa melalui rantai distribusi yang merugikan. Jamaah dalam konteks ini tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai donatur dan partisipan aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi, sehingga terbentuk suatu ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang saling menguntungkan. Model ini sejalan dengan konsep community-based enterprise dan hybrid enterprise, di mana aktivitas ekonomi dijalankan dengan mengintegrasikan tujuan sosial dan partisipasi komunitas secara berkelanjutan sebagaimana gambar berikut



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Selain memberikan dampak ekonomi yang nyata, program ini juga menunjukkan keberlanjutan yang didukung oleh tingginya keterlibatan jamaah, fleksibilitas dalam merespons kondisi pertanian, serta adanya siklus distribusi yang terus berulang. Namun demikian, untuk mencapai skala yang lebih luas dan keberlanjutan jangka panjang, diperlukan penguatan pada aspek sistem operasional, manajemen sumber daya manusia, koordinasi antar pihak, serta pengembangan kelembagaan yang lebih terstruktur.

Dengan demikian, model yang dikembangkan oleh Masjid Nurul Ashri tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan harga anjlok di tingkat petani, tetapi juga berpotensi menjadi model kewirausahaan sosial berbasis masjid yang dapat direplikasi dan dikembangkan di berbagai daerah. Model ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan berbasis kekuatan komunitas

IV. KESIMPULAN / CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh Masjid Nurul Ashri Sleman merupakan bentuk inovasi sosial yang mampu mengintegrasikan kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan dalam satu sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk integrasi antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan yang dilakukan oleh Masjid Nurul Ashri diwujudkan melalui program borong hasil panen dan skema jasa titip (jastip). Program ini menghubungkan petani sebagai produsen dengan jamaah sebagai konsumen sekaligus donatur melalui peran masjid sebagai pengelola dan penghubung. Integrasi ini tidak hanya menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga menghasilkan nilai sosial berupa kepedulian terhadap petani, distribusi hasil panen secara adil, serta pembentukan ekosistem ekonomi berbasis komunitas. Program ini bersifat adaptif terhadap kondisi pertanian dan berkelanjutan karena berjalan secara rutin dengan berbagai komoditas seperti sayur, semangka, dan singkong.
2. Peran masjid dalam mengembangkan model kewirausahaan sosial bagi petani di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sangat strategis, yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan penggerak

komunitas. Sebagai fasilitator, masjid menyediakan sistem distribusi dan akses pasar melalui jastip dan bazar. Sebagai mediator, masjid menghubungkan petani dengan jamaah serta memvalidasi kondisi di lapangan sebelum mengambil keputusan. Sebagai penggerak, masjid mampu membangun partisipasi jamaah melalui narasi sosial di media sosial dan komunitas, sehingga tercipta pasar kolektif yang mendukung keberlangsungan program.

3. Faktor yang mendukung integrasi ini meliputi tingginya antusiasme jamaah, keterlibatan aktif petani, pemanfaatan media sosial sebagai sarana mobilisasi, serta koordinasi internal yang cukup baik antara pengurus dan relawan. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kendala logistik dan distribusi, keterbatasan fasilitas penyimpanan hasil panen, fluktuasi harga komoditas, serta potensi konflik antar petani. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang adaptif dan komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat.
4. Dampak integrasi kewirausahaan sosial dan pedesaan ini terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan tergolong signifikan. Bagi petani, program ini memberikan akses pasar alternatif selain tengkulak, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan mereka melanjutkan produksi. Bagi jamaah, program ini memberikan manfaat ekonomi melalui akses produk dengan harga yang kompetitif serta meningkatkan kepedulian sosial melalui partisipasi dalam kegiatan sedekah dan jastip. Sementara itu, bagi masjid, program ini memperkuat perannya sebagai pusat kegiatan sosial-ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewirausahaan sosial dan kewirausahaan pedesaan yang dilakukan oleh Masjid Nurul Ashri mampu menciptakan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berpotensi untuk direplikasi di berbagai wilayah dengan karakteristik yang serupa.

REFERENSI / REFERENCE

- BPS JAWA TENGAH. (2025). Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Tengah 2024 (Angka Tetap). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2024(17), 1–21.
- Fahriza, F., & Irkhani, A. L. (2025). *BPS ungkap dalam 10 tahun terakhir, 153 ribu petani di DIY tinggalkan sektor ini*. Radar Jogja. Diakses pada Juni 2023. [Radar Jogja](#)
- Faizal, M. A., Arta, A., Ni'mah, J., & Ainur, Z. F. (2023). Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 123-134. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3964>
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's digital divide: Rural-urban linkages. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Ibanez, E. D. (2024). *Urbanisasi Indonesia: Antara mimpi kota besar dan realitas perkotaan*. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/urbanisasi-indonesia-antara-mimpi-kota-besar-dan-realitas-perkotaan/>
- Irwantoro, I. (2023). Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Padi Organik Sebagai Upaya Kemandirian Desa. *Develop*, 7(1), 38-61. <https://doi.org/10.25139/dev.v7i1.6052>
- Kementerian Pertanian. (2024). *Statistik makro sektor pertanian tahun 2024*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/661>
- Lestari, M. A., Suherty, L., & Sa'roni, C. (2020). Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Petani Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 3(1), 200-213.
- Saputra, E., & Agustina, D. (2021). Peran institusi masjid dalam pembangunan ekonomi lokal: Studi kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 174-195. <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687>
- Sugiharti, R. R., ABDULAH, R., Rahmayani, D., & Asmarani, T. E. (2024). Internet and Farmers Wellbeing: Evidence from Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 177-186.
- Kompas.id. (2023). *Alih fungsi lahan mengancam produksi padi nasional*. <https://www.kompas.id/artikel/alih-fungsi-lahan-mengancam-produksi-padi-nasional>
- Wahyuni, R. N. T., Ikhsan, M., Damayanti, A., & Khoirunurrofik, K. (2022). Inter-district road infrastructure and spatial inequality in rural Indonesia. *Economies*, 10(9), 229. <https://doi.org/10.3390/economies10090229>